

Soliditas Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Mengusung Anak Presiden di Pemilihan Walikota Surakarta 2020

Dimas Subekti ¹, Ridho Al-Hamdi ²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Dikirimkan: 10 Maret 2024

Direvisi: 21 September 2024

Diterbitkan: 08 Oktober 2024

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengusung putra Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Walikota Surakarta 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah proses pengambilan keputusan dalam konteks pencalonan Wali Kota Surakarta oleh PDIP tersentralisasi kepada ketua umum sehingga sebagai organisasi politik lebih mengarah pada personalisasi institusi. Kemudian, PDIP juga tidak terbuka dalam proses rekrutmen calon yang akan diusung nya. Hal ini yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara pengurus PDIP di tingkat daerah dengan tingkat nasional. Kemudian, partai ini juga lemah dalam hal kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik dan kaderisasi sistematis. Dengan kata lain, soliditas internal PDIP menghadapi Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 dalam kondisi kritis. Sisi ideologi dan komitmen kader yang hanya menjadi faktor penguat soliditas PDIP. Hal ini menjadi catatan bahwa meskipun PDIP merupakan partai besar di Kota Surakarta bahkan Indonesia tidak menjamin proses internalnya berjalan baik. Implikasinya bahwa partai politik sebagai lembaga publik mempunyai ujian nyata dalam mempertahankan eksistensinya secara pelembagaan, yang akan berdampak pada sisi elektoral.

KATA KUNCI

Soliditas. Partai Politik. PDIP. Pemilihan Wali Kota. Kota Surakarta

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak dari presiden aktif Indonesia, dalam pemilihan walikota Surakarta 2020. Masalahnya adalah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) antara kepengurusan di tingkat daerah kota Surakarta dengan pusat dalam pengusungan calon untuk pemilihan walikota Surakarta 2020. Konflik tersebut terkait dengan ditolaknya calon kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang

Korespodensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jambi. Jl. Lintas Jambi – Muara Bulian Muaro Jambi, Jambi, Indonesia.

Email: dimassubektio5@unja.ac.id

(DPC) Kota Surakarta oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Calon yang ditolak tersebut adalah Achmad Purnomo, kader senior PDIP sekaligus petahana Wakil Wali Kota Surakarta (CNNIndonesia.com, 2020). Sementara itu, DPP PDIP ingin mengusung putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi pencalonan Wali Kota kepada Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Jawa Tengah setelah sebelumnya tidak bisa mendaftar melalui DPC PDIP Kota Surakarta (Subekti et al., 2023).

Dikeluarkannya surat rekomendasi oleh DPP PDIP tersebut membuat beberapa pihak di internal partai merasa kecewa. Achamad Purnomo, kader senior sekaligus calon yang direkomendasikan oleh DPC PDIP Kota Surakarta, merupakan salah satu pihak yang dirugikan (Flora, 2020). Begitu juga dengan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo, yang mengaku bahwa dirinya dan banyak kader di Surakarta kecewa dengan keputusan DPP tersebut. Kekecewaan tersebut dikarenakan calon yang mereka dukung, Achmad Purnomo, tergeser oleh putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk pemilihan walikota Surakarta 2020 (Isnanto, 2020).

Kemudian, FX Hadi Rudyatmo juga menjelaskan bahwa DPP PDIP melakukan kesalahan dan melanggar aturan internal partai jika tetap merekomendasikan nama selain yang diusulkan DPC. Pasalnya, Peraturan PDIP No. 24 Tahun 2017 tentang rekrutmen dan seleksi wali kota dan wakil wali kota menyebutkan bahwa jika pengurus di tingkat daerah memperoleh minimal 25 persen suara pada pemilu terakhir, maka dapat melakukan penjaringan calon secara tertutup. Selain itu, FX Hadi Rudyatmo juga menyindir Gibran Rakabuming Raka yang memilih jalur "pintas", langsung menemui petinggi partai di tingkat DPP PDIP ketimbang di tingkat DPC (Isnanto, 2019).

Namun, pernyataan terkait pelanggaran aturan pencalonan dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arif Wibowo. Dia mengatakan DPC PDIP Kota Surakarta tidak bisa memutuskan calon yang akan maju. Arif Wibowo menjelaskan mekanisme penjaringan pencalonan Pilkada 2020, DPC memiliki kewenangan untuk menjaring kemudian DPD dan DPP yang berwenang menyaring. Arif Wibowo juga menjelaskan bahwa DPP memegang teguh aturan jika mengusung seseorang tanpa melalui proses penjaringan atau di DPC. Karena ada tiga pintu untuk mendaftar pemilihan kepala daerah, yaitu di DPC, DPD, dan DPP (Putri, 2019). Uraian tersebut menjelaskan adanya konflik dan perbedaan pandangan di internal PDIP dalam pencalonan Wali Kota Surakarta tahun 2020. Di sinilah soliditas internal PDIP dipertanyakan dan dipermasalahkan. Meskipun PDIP merupakan partai pemenang pemilu di Kota Surakarta bahkan di tingkat Indonesia, ternyata konflik internal masih tidak dapat dihindari.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan soliditas partai politik. Penelitian yang dilakukan oleh (Al-Hamdi, 2022; Al-Hamdi et al., 2023; Anawati & Al-Hamdi, 2020) menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki soliditas yang kokoh secara kelembagaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Djuyandi & Suparman, 2020; Noor, 2015) menjelaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki soliditas internal yang lemah. Kemudian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PDIP. Penelitian dari (Budiana, 2023; Priyanto et al., 2021; Priyowidodo et al., 2014; Purnama et al., 2014) membahas tentang strategi kampanye dan komunikasi politik PDIP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk strategi kampanye dan komunikasi politik PDIP adalah dengan menggunakan strategi pencitraan/figur, strategi basis massa, memasang calon unggulan dengan sesama kader PDIP yang populer, dan pendekatan komunitas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masing-masing penelitian membahas tentang soliditas PKS, Golkar, PKB dan PPP. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas soliditas PDIP di tengah konflik internal. Sehingga, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan soliditas PDIP dalam konteks kasus pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Penelitian ini diposisikan untuk memperkuat kajian soliditas internal partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan Walikota Surakarta 2020.

Randall & Svåsand, (2002) menawarkan sebuah model elemen atau dimensi sentral pelebagaan partai. Pertama, aspek struktural dari dimensi internal adalah sistem (systemness). Sistem dalam konteks ini adalah perluasan jangkauan, kepadatan, dan keteraturan interaksi yang membentuk struktur partai. Keteraturan menunjukkan tingkat rutinitas dan munculnya standar yang diterima secara luas yang mengatur perilaku. Namun, spesifikasi ini tidak mencakup standar struktur organisasi yang "rasional" dan ketat. Ketika berbicara tentang partai, pengembangan organisasi sering kali dianggap sebagai penciptaan struktur yang terkodifikasi dan pertumbuhan keanggotaan massa, seperti dalam model partai Barat klasik. Namun, ada cara lain bagi partai untuk melembagakan dirinya. Kedua, aspek sikap dari dimensi internal adalah 'penanaman nilai'. Yang dimaksud dengan frasa ini adalah sejauh mana para peserta dan pendukung partai (baik yang masuk dalam kategori keanggotaan resmi maupun tidak) mengembangkan identifikasi dan komitmen terhadap partai yang melampaui motif-motif yang lebih bersifat utilitarian atau motif-motif yang lebih mementingkan diri sendiri dalam keterlibatannya. Hal ini berkaitan dengan pencapaian partai dalam membentuk budaya atau sistem nilai yang unik dan dapat dianggap sebagai komponen penting dari kohesi partai (Randall & Svåsand, 2002).

Ketiga, dimensi eksternal, aspek struktural, berkisar pada masalah otonomi. Sebuah partai tidak bergantung pada lembaga atau kelompok yang mensponsori atau hanya "terkait" dengan lembaga atau kelompok tersebut dalam arti netral (dalam literatur, "keterkaitan" biasanya dilihat sebagai hal yang positif). Masalah otonomi sangat penting bagi dimensi struktural dan eksternal. Tingkat saling ketergantungan dapat memberikan dampak yang sangat menguntungkan di mana pihak yang satu merupakan elemen yang mendominasi dalam kemitraan dalam hal memperluas sumber daya (yang mungkin sangat dibutuhkan) dan, pada kenyataannya, dalam hal pelebagaan eksternal. Keempat, aspek sikap eksternal, reifikasi, mengacu pada sejauh mana keberadaan partai tersebut terbentuk dalam imajinasi publik. Ketika hal ini semakin menjadi bagian dari cakrawala politik, individu

dan institusi, termasuk partai-partai lain, secara sadar atau tidak, akan menyesuaikan ekspektasi dan aspirasi mereka dengan hal tersebut (Randall & Svåsand, 2002).

Kemudian, Noor, (2015) menjelaskan teori soliditas partai politik, yang berarti keadaan internal partai yang kokoh dan solid. Sebuah bentuk yang menggambarkan berbagai elemen yang bersatu dan menjadi tegas ketika bersama. Teori ini merupakan perwujudan dari apa yang disebut oleh (Randall & Svåsand, 2002) sebagai dimensi internal dan eksternal dalam institusi partai politik. Teori soliditas partai politik memiliki empat variabel, yaitu pertama, Kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan keputusan. Setelah anggota menyetujui sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten. Karena menjamin kepatuhan terhadap norma, kesetaraan di hadapan konstitusi partai, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan prosedural menopang rasa kebersamaan. Kedua, Mekanisme resolusi konflik. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang mengatasi konflik untuk membantu mengembangkan hasil yang saling menguntungkan dan memuaskan setiap kelompok yang bertikai (Al-Hamdi, 2022; Noor, 2015).

Ketiga, Kauterisasi sistematis. Hal ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen yang adil, evaluasi kader yang sistematis, pelatihan yang sistematis dan bertahap dalam merekrut anggota baru dan elit, serta jenjang karir mereka. Keempat, komitmen terhadap nilai-nilai atau ideologi yang dianut. Adanya komitmen terhadap nilai-nilai bersama berdampak pada adanya infusi nilai, di mana nilai-nilai tertentu menanamkan nilai-nilai tertentu kepada para anggota. Dengan demikian, partai yang terlembaga adalah partai yang mampu mengembangkan nilai-nilainya dan mengakar di masyarakat (Al-Hamdi, 2022; Noor, 2015).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surakarta dalam konteks soliditas pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah simpatisan Achmad Purnomo, tim sukses Gibran Rakabuming Raka, pengurus DPC PDIP Kota Surakarta, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta. Sementara itu, pengumpulan data dokumentasi berasal dari berita-berita online yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik, artikel-artikel jurnal yang relevan, media sosial, dan situs resmi partai. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar variabel dan verifikasi data, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan (Al-Hamdi et al., 2020).

Kepemimpinan Prosedural dalam Pengambilan Keputusan

Partai politik harus memiliki aturan main internal yang jelas, dalam hal ini proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan bagian ini sangat krusial bagi para kader dalam menjaga keberlangsungan partai (Biezen & Poguntke, 2014; Lindberg et al., 2008). Terdapat dinamika yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh PDIP pada pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi di publik terkait

keistimewaan yang didapatkan Gibran Rakabuming Raka karena statusnya sebagai putra Presiden Joko Widodo. Proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka bersinggungan langsung dengan kader senior dari PDIP dan petahana wakil walikota Surakarta, Ahmad Purnomo.

Hasil wawancara dengan M. Farid Sunarto, seorang simpatisan Ahmad Purnomo, menyatakan bahwa keputusan sudah bulat untuk mendukung Achmad Purnomo di tingkat DPC. Alasannya adalah rekam jeaknya yang sudah jelas di PDIP, dan sudah dua periode menjadi wakil walikota. Namun pada kenyataannya, DPP memilih yang lain. Begitu juga penjelasan dari wakil ketua bidang kaderisasi & Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, F.X. Sukasno, menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam menentukan Achmad Purnomo yang direkomendasikan DPC.

"Proses penentuan calon di Surakarta tergantung dari aspirasi tingkat di bawah DPC karena struktur PDI Perjuangan sudah lengkap di Surakarta. Dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga DPC. Berdasarkan hal tersebut, DPC mengajukan nama Gibran sebagai calon walikota Surakarta. Sebelum itu, Pak Gibran masih belum ada komunikasi dengan DPC. Di beberapa media, dia juga mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Kalau kemudian beliau tiba-tiba mau dan mendaftar, kami akan kaget. Tapi, di PDI Perjuangan, Ibu Megawatinya yang memutuskan langsung" (wawancara pada 14 Desember 2021).

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Ginda Ferachtriawan, tim sukses Gibran Rakabuming Raka juga menjelaskan hal tersebut:

"Gibran mencalonkan diri karena dorongan dari kaum milenial di Surakarta. Kemudian beliau ingin mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Surakarta, namun DPC masih perlu membuka pendaftaran, bisa dikatakan juga komunikasi dengan DPC sulit. Oleh karena itu, Mas Gibran menemani saya mendaftar ke DPD PDI Perjuangan. Setelah itu, tinggal menunggu keputusan dari internal partai yang mencalonkan. Iya benar, Mas Gibran datang ke Ibu Megawati, tapi hanya silaturahmi saja." (wawancara pada tanggal 9 Desember 2021).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa meskipun Achmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Raka telah melakukan tahapan pendaftaran melalui dinamika di tingkat DPC Kota Surakarta dan DPD Provinsi Jawa Tengah. Namun kemudian, di internal PDIP, ketua umum memiliki kuasa penuh untuk mengeluarkan surat rekomendasi calon yang akan diusung oleh PDIP dalam pemilihan Walikota Surakarta 2020. Proses penetapan calon yang dilakukan PDIP selama ini menggunakan metode penunjukan. Secara formal, PDIP melakukan serangkaian proses penjarangan calon dari tingkat pengurus bawah hingga DPP. Namun, hasil dari proses tersebut tidak memiliki kekuatan yang besar karena ketua umum PDIP memiliki hak prerogatif untuk menentukan calonnya. Penunjukan tersebut tidak memiliki referensi yang jelas, sehingga organisasi politik yang cukup besar ini bergantung pada keputusan pribadi.

Praktik ini menjadi sangat berbahaya bagi partai politik itu sendiri dan demokrasi Indonesia secara umum. Sebagian besar peneliti khawatir bahwa personalisasi politik akan merusak demokrasi (lihat, misalnya, Balmas et al., 2014; Cabada & Tomšič, 2016; Mainwaring & Torcal, 2006; Poguntke & Webb, 2008). Beberapa kekhawatiran yang muncul adalah bahwa peningkatan personalisasi akan

memperkuat tren populis dan memperkenalkan elemen-elemen irasional ke dalam politik demokratis; bahwa hal tersebut akan lebih menekankan pada karisma individu daripada aturan hukum dan institusi yang impersonal; dan bahwa hal tersebut akan melemahkan mekanisme akuntabilitas (Pedersen & Rahat, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim sukses, Gibran Rakabuming Raka sempat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri beberapa kali. Hal ini menjelaskan bahwa komunikasi politik antara keduanya berjalan dengan lancar, namun tidak sebaliknya pada posisi Ahmad Purnomo. Sehingga surat rekomendasi yang turun juga mengisyaratkan kuatnya posisi tawar Gibran Rakabuming Raka dari DPP PDIP. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh PDIP bersifat sentralistik atau dapat dikatakan berpusat pada ketua umum. Kader dan pengurus di tingkat bawah tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam hal penentuan calon yang akan berkontestasi. Sehingga PDIP sebagai organisasi politik lebih mengarah pada personalisasi kelembagaan. Karena keputusan cenderung ditentukan oleh satu orang di dalam partai.

Personalisasi partai politik dalam kondisi tertentu menguntungkan partai dalam menjaga soliditas partai. Namun, dampak positif tersebut hanya bersifat semu dan berjangka pendek. Personalisasi partai politik tidak dapat dibiarkan dan dikompromikan karena fenomena tersebut berdampak pada bangunan partai politik yang dibangun dari sistem ketergantungan pada figur tertentu yang dapat berperan secara holistik bagi partai. Lebih jauh, kondisi ini mengancam demokrasi internal partai yang menyebabkan pelembagaan partai politik menjadi terhambat, menyebabkan matinya demokrasi internal partai hingga berdampak buruk pada sirkulasi elit (Cross & Katz, 2013; Kabasakal, 2014).

Dalam kasus penentuan calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan walikota Surakarta yang begitu dinamis, figur-figur kharismatik yang muncul justru berasal dari struktur partai. Hal ini karena terkait dengan kebijakan internal PDIP mengenai penentuan calon kepala daerah yang tersentralisasi di DPP sehingga DPC dan DPD tidak memiliki kewenangan. PDIP yang memang terlihat begitu kuat dengan sosok seorang ketua umum Megawati Soekarnoputri dapat melakukan intervensi di tingkat struktural bawah dalam hal ini DPC PDIP Kota Surakarta. Megawati Soekarnoputri mengambil peran yang cukup penting dalam isu-isu yang muncul dalam keputusan-keputusan formal dan negosiasi politik. Wawancara dengan M Farid Sunarto sebagai simpatisan Ahmad Purnomo juga menyampaikan hal tersebut:

"Saya bukan orang partai, tapi saya mendukung Pak Purnomo karena beliau sudah menjadi teman saya sejak lama. Mengenai keputusan rekomendasi, itu adalah dinamika internal. Tapi Ibu Megawati, sebelum mengeluarkan rekomendasi, Pak Purnomo sudah duduk bersama Pak Gibran dan Pak Teguh. Saya ikut langsung dengan Pak Purnomo ke Jakarta, jadi ada diskusi tentang calon ini. Ya, itulah dinamika dalam politik, mungkin Ibu Megawati punya alasan tersendiri. Karena yang saya tahu selama ini, PDI Perjuangan menuruti apa yang dikatakan Bu Mega. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa dukungan PDI Perjuangan sangat besar di Kota Surakarta." (Wawancara pada tanggal 29 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa dalam dinamika pencalonan Gibran Rakabuming Raka, Megawati Soekarnoputri menjadi sosok yang tampil menyelesaikannya. Hal ini juga tidak terlepas dari posisinya sebagai ketua umum PDIP yang memang memiliki hak prerogatif. Apalagi sosok Megawati Soekarnoputri yang disegani di internal partai, bisa berkomunikasi langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso dan Ahmad Purnomo. Hal ini menjadi krusial untuk mencegah gejolak yang lebih besar di internal PDIP, khususnya dalam pemilihan walikota Surakarta. Selain itu, DPC PDIP Kota Surakarta membutuhkan kewenangan yang lebih besar untuk mengubah keputusan Megawati Soekarnoputri. Sehingga, kebijakan akhir nantinya siapapun yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan Walikota Surakarta merupakan keputusan Megawati Soekarnoputri.

Apalagi sosok Megawati Soekarnoputri yang dihormati oleh kader PDIP tidak bisa dilepaskan dari nama Soekarno. Soekarno adalah ayah dari Megawati Soekarnoputri dan tokoh sentral dalam mendirikan PDIP. Oleh karena itu, kader-kader PDIP memiliki kedekatan emosional dan penghormatan yang sangat tinggi terhadap presiden pertama Indonesia tersebut. Sehingga kharisma Soekarno tidak bisa dihilangkan, bahkan sampai menular ke sosok putrinya yang kini menjabat sebagai ketua umum PDIP. PDIP tidak bisa dipisahkan dari trah Soekarno, PDIP menyiratkan adanya trah Soekarno. Trah Soekarno yang dimaksud adalah Megawati Soekarnoputri. Hasto Kristyanto, sekretaris jenderal PDIP, mengatakan bahwa PDIP tidak bisa dilepaskan dari ideologi Bung Karno, sang proklamator, yang juga ayah Megawati Soekarno. PDIP telah melakukan survei internal, dan 84 persen kader menyatakan bahwa mereka bergabung dengan PDI-P karena ingin bersatu dengan ide dan cita-cita Bung Karno (A. Budi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kader PDIP sangat menghormati Soekarno dan memiliki hubungan yang erat dengan garis keturunannya, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin partai.

Oleh karena itu, Megawati Soekarnoputri mengambil peran yang cukup besar dalam menyelesaikan dinamika yang terjadi dalam pencalonan walikota Surakarta. Namun, sosok Soekarno juga tidak bisa dihilangkan di balik kharismanya Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, para kader sangat menghormati putri dari pendiri dan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Hal ini menjadi faktor penguat bagi para kader untuk mengikuti kebijakan yang diambil Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon Wali Kota Surakarta tahun 2020.

Mekanisme penyelesaian konflik

Partai politik yang terlembaga adalah partai politik yang dapat mencegah potensi konflik. Dalam konteks DPC PDIP Kota Surakarta, dalam mencegah kemungkinan terjadinya konflik juga mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh perlunya transparansi DPC yang lebih dari DPC dalam melakukan rekrutmen calon. Kemudian adanya ketidakharmonisan antara DPC PDIP Kota Surakarta dengan DPP mengenai pedoman rekrutmen calon. Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX, Hadi Rudyatmo, memiliki pandangannya terkait rekrutmen calon walikota, begitu juga di tingkat DPP, setelah mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka juga ingin mencalonkan diri.

Dalam wawancara dengan Ginda Ferachtriawan, tim sukses Gibran Rakabuming Raka juga menyebutkan bahwa DPC PDIP Kota Surakarta tidak membuka pendaftaran bagi kader lain selain Achmad Purnomo. Hal ini membuat beberapa kader, termasuk dirinya, yang ingin mendaftar tidak dapat melakukannya. Gibran Rakabuming Raka juga tidak bisa mendaftar di DPC, yang mengharuskannya mendaftar di tingkat DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

DPC PDIP Kota Surakarta tidak terbuka dalam proses pendaftaran bakal calon walikota Surakarta yang akan diusung. Padahal dalam prosesnya, DPP PDI Perjuangan Kota Surakarta seharusnya terbuka dan menerima semua kader yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon walikota. Karena keputusan akhir ada di DPP, maka proses di tingkat DPC dilakukan secara terbuka dengan mengakomodir semua kader yang ingin mendaftar. Karena tahapan-tahapan penjaringan calon sudah tertuang dalam peraturan dan anggaran rumah tangga internal PDI Perjuangan. Meskipun hasil musyawarah menghasilkan nama Achmad Purnomo, tidak serta merta mengurangi kewajiban DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta untuk melaksanakan tahapan rekrutmen calon. Begitu juga dengan Achmad Purnomo yang juga harus mengikuti tahapan pendaftaran. Hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Surakarta menjelaskan hal tersebut:

"PDI-P Surakarta sudah kuat, tapi ada masalah di dalamnya. Yang paling kentara adalah soal Pak Gibran dan Pak Pur. Soal pencegahan itu tidak bisa terjadi lagi karena DPC Surakarta kurang terbuka dalam merekrut calon. Makanya ada kader yang ingin mencalonkan diri tapi tidak bisa. Saya tahu partai harus secara resmi membuka rekrutmen calon dan kemudian mengakomodasi semua kader yang ingin mendaftar. Ada yang namanya penyaringan, itu mungkin proses yang kurang terbuka di DPC dalam kasus kemarin. Terbukti juga Gibran sudah mendaftar di DPD. Mungkin DPC membuka pendaftaran, tapi sepertinya itu hanya formalitas untuk mengakomodir pendaftaran Pak Purnomo." (wawancara pada tanggal 23 Desember 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh DPC PDIP Kota Surakarta dalam hal pencegahan konflik seharusnya dapat berjalan lebih baik. Hal ini dikarenakan mekanisme penjaringan bakal calon Wali Kota tidak dilakukan secara terbuka. Pada posisi ini, konflik tidak dapat dihindari karena kader yang ingin mengikuti kontestasi tidak diakomodir dan merasa dianaktirikan oleh DPC terkait pendaftaran dan dibuktikan pada kasus Gibran Rakabuming Raka yang harus mendaftarkan diri untuk menjadi calon Walikota Surakarta melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kemudian, kader lainnya, Ginda Ferachtriawan, melaporkan diri di DPD untuk mengikuti kontestasi. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang belum selesai dalam penjaringan calon di internal DPC PDI-P Kota Surakarta. Hal ini mengakibatkan konflik antara Gibran Rakabuming Raka, Achmad Purnomo dan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sendiri, terutama setelah surat rekomendasi pencalonan turun dari DPP.

Dinamika tersebut kemudian ditambah dengan hubungan yang kurang baik antara DPC Kota Surakarta dengan DPP PDIP-dibuktikan dengan beberapa pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang menyalahkan DPP saat surat rekomendasi turun untuk Gibran Rakabuming Raka. FX Hadi

Rudiyatmo mengaku kecewa dengan turunnya rekomendasi untuk Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Hal ini dikarenakan hasil tersebut berbeda dengan usulan nama yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. FX Hadi Rudiyatmo merasa tidak memiliki harga diri karena rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan usulannya. Oleh karena itu, isu tersebut memperjelas bahwa DPC PDIP Kota Surakarta lemah dalam mencegah potensi konflik. Kurangnya transparansi dalam rekrutmen kandidat dan buruknya hubungan dengan DPP karena adanya kepentingan politik dan akibat dari perbedaan penafsiran terhadap peraturan internal partai membuat pencegahan ini tidak efektif.

Partai politik yang terlembaga dengan baik dapat menemukan solusi yang komprehensif untuk menghentikan konflik. Partai politik harus memiliki aturan untuk menyelesaikan perselisihan internal dan membentuk seseorang (atau subunit) yang menangani masalah konflik internal (Lupu, 2014). Mekanisme atau badan yang menangani fungsi ini diperlukan karena partai politik sebagai sebuah sistem bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya fungsi-fungsi partai, termasuk pengelolaan soliditas internal. PDIP memiliki mahkamah partai yang tertuang dalam AD/ART 2019-2024 pasal 40. Mahkamah partai ini diketuai oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang hukum, Djarot Syaiful Hidayat. Mahkamah partai ini berada di tingkat DPP, bukan di tingkat bawah. Oleh karena itu, permasalahan di internal partai yang melibatkan kader di tingkat pusat dan daerah diselesaikan di mahkamah partai.

Dalam kasus pencalonan Wali Kota Surakarta, konflik antara DPC dengan Achmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Raka dari DPP PDIP memunculkan berbagai sorotan. Namun di sini terlihat bahwa PDIP, khususnya DPC Kota Surakarta, dengan cepat menyelesaikannya. Hal ini tidak terlepas dari DPC PDIP Kota Surakarta merupakan partai politik yang besar dan memiliki mental yang stabil. Kemudian juga, dalam hal ini DPC PDIP juga tunduk melaksanakan keputusan DPP. Meskipun surat rekomendasi yang dikeluarkan berbeda dengan yang diharapkan. Dalam wawancara dengan YF Sukasno, wakil ketua Bidang Kaderisasi & Ideologi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta mengatakan bahwa:

"Kami dari DPC, setelah mengetahui surat rekomendasi turun untuk Pak Gibran, langsung mendukung. Ya kita hormati keputusan ketua umum, dan kami DPC melaksanakan keputusan itu. Menginstruksikan kader untuk berjuang membantu Mas Gibran. Kami di PDI Perjuangan ada istilah tegak lurus, apa yang sudah diputuskan oleh Ibu Mega, kami patuh mengikuti. Apalagi PDI Perjuangan di Surakarta ini sudah besar, pendukungnya banyak, jadi masalah kecil seperti ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Buktinya mas Gibran menang di pilkada kemarin, perjuangan kader PDI Perjuangan Surakarta bersama-sama." (Wawancara pada 23 Desember 2021).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah pencalonan Walikota Surakarta tidak sampai pada ranah mahkamah partai yang menangani masalah konflik di internal PDIP. Cara penyelesaian yang dilakukan DPC PDIP Kota Surakarta adalah dengan mengikuti keputusan DPP, dalam hal ini ketua umum Megawati Soekarnoputri. DPC menyadari bahwa kesimpulan calon walikota yang akan diusung oleh PDIP merupakan hak prerogatif ketua umum. Oleh

karena itu, DPC PDIP berusaha menjalankan instruksi dari DPP untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga berusaha membantu memenangkan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Surakarta.

Lebih lanjut, berdasarkan penuturan M. Farid Sunarto selaku tim sukses Achmad Purnomo, ia menjelaskan bahwa sikap yang diambil oleh Achmad Purnomo yang tidak melakukan perlawanan secara keras terhadap keputusan DPP juga menjadi pendorong untuk meredam konflik. Meskipun secara naluriah, keputusan tersebut membuat Achmad Purnomo, calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPC PDIP Kota Surakarta, kecewa. Namun, Achmad Purnomo terlihat menerima keputusan tersebut dengan tenang dan tidak memberikan respon yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas Achmad Purnomo terhadap PDIP cukup besar. Achmad Purnomo bahkan bersedia menjadi penasehat Gibran Rakabuming Raka karena posisinya sebagai kader senior tentu membuat hubungan keduanya secara otomatis terselesaikan.

Menariknya, menurut konfirmasi yang dilakukan kepada para simpatisannya, Achmad Purnomo tidak lagi terjun ke dunia politik setelah kejadian ini. Ia ingin memberikan waktunya untuk sementara waktu kepada keluarga dan tidak ingin terlibat dalam dunia politik, baik di tingkat Kota Surakarta maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kekecewaan tersebut masih tertanam di hati Achmad Purnomo, sehingga menunjukkan sikapnya untuk tidak berpolitik di PDIP.

Kemudian, Achmad Purnomo, setelah tidak mendapatkan surat rekomendasi dari DPP PDIP, sempat mendapatkan beberapa tawaran dari partai lain untuk mengusungnya sebagai calon Walikota. Namun, Achmad Purnomo menolak ajakan dari partai lain untuk mendukungnya sebagai calon Walikota Surakarta. Hal ini menjadi kesempatan bagi Achmad Purnomo untuk melepaskan ambisinya menjadi Walikota dan menjawab keraguan pengurus DPP PDIP, dalam hal ini ketua umum Megawati Soekarnoputri. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Achmad Purnomo karena tidak ingin menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, Achmad Purnomo juga ingin menghindari adu domba dengan partai politik yang dinaunginya selama ini.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik di DPC PDIP Kota Surakarta terkait pencalonan Wali Kota berjalan tanpa masuk ke ranah mahkamah partai. Namun, dapat diselesaikan secara informal dengan DPC PDIP Kota Surakarta mengikuti keputusan DPP. Hal ini juga tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang tersentralisasi di tubuh PDIP sehingga pengurus di tingkat bawah tidak memiliki kekuatan untuk menggugat kebijakan dari DPP. Kemudian, faktor vital lain yang membuat masalah ini tidak sampai ke ranah mahkamah partai dan tidak menjadi batu sandungan bagi Gibran Rakabuming Raka dan PDIP adalah kebijaksanaan Achmad Purnomo.

Kaderisasi Sistematis

Proses Gibran Rakabuming Raka menjadi calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan Walikota Surakarta juga perlu berbenah dalam hal kaderisasi. Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang belum lama menjadi kader PDIP, sehingga kebangkitan internalnya perlu lebih kuat. Selain itu, secara regulasi,

Gibran Rakabuming Raka tidak masuk dalam syarat kader untuk menjadi calon yang diusung PDIP. Karena syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang diusung PDIP minimal harus menjadi kader selama tiga tahun. Ketentuan syarat tersebut tertuang dalam Peraturan PDIP 24 tahun 2017 tentang rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Masalah persyaratan ini juga disadari oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta FX, Hadi Rudyatmo, yang menjelaskan bahwa proses pengusungan Gibran Rakabuming Raka oleh DPP akan menyalahi aturan partai. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui dan memahami ketentuan persyaratan dalam peraturan internal partai. Begitu juga dengan tim sukses Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang kader PDIP. Hal ini diperkuat dari wawancara dengan Ginda Ferachtrawan, tim sukses Gibran Rakabuming Raka sekaligus kader PDIP Kota Surakarta, yang menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dan menemukan poin persyaratan tersebut. Sehingga ia dan kader lainnya dengan tegas mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon PDIP. Evi Kusuma Sundari, politisi PDIP, juga menyatakan bahwa tidak ada syarat administratif bagi kader PDIP yang mencalonkan diri di internal partai untuk minimal tiga tahun aktif di partai. PDIP dalam pilkada memang akan memprioritaskan kader internal. Namun, dia juga menjelaskan bahwa dirinya perlu mengetahui apakah ada surat edaran yang berisi persyaratan administrasi minimal tiga tahun menjadi kader. Ia meminta konfirmasi kepada sekretaris jenderal PDIP Hasto Kristyanto (M. Budi, 2019).

Lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka harus memenuhi persyaratan menjadi caleg berdasarkan peraturan partai. Namun, DPP PDIP dalam hal ini ketua umum tetap mengeluarkan keputusan untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Surakarta tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang proses pengambilan keputusan internalnya bersifat sentralistik, sehingga kebijakan yang diambil akan cenderung subyektif. Lebih dari itu, aturan-aturan yang berlaku di internal partai tidak diperhatikan bahkan terkesan diabaikan dan dilibas hanya untuk kepentingan politik. Latar belakang Gibran Rakabuming Raka juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini, sebagai putra presiden aktif Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan dan memiliki kedekatan dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri menjadi faktor penentu keputusan tersebut.

Kemudian, hasil dari proses kaderisasi tersebut harus menjadi kriteria atau tolak ukur dalam perekrutan dan pemilihan pemimpin partai, baik sebagai pengurus maupun ketua umum. Kemudian, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu meliputi pemilihan calon legislatif dan calon eksekutif yang akan diusung. Dalam hal ini, tugas partai adalah menentukan siapa yang berhak dicalonkan dan menduduki jabatan publik (Bjarnegård & Kenny, 2015; Crowder-Meyer, 2013). Gibran Rakabuming Raka dan Achmad Purnomo merupakan kandidat terkuat calon walikota Surakarta 2020 yang akan diusung oleh PDIP. Hasil penjangkaran berjenjang dari tingkat DPC hingga DPD dilaporkan ke DPP PDIP. Hal ini karena penentuan calon merupakan kewenangan DPP, dalam hal ini hak preogratif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Surat rekomendasi pun keluar atas nama Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon Wali Kota Surakarta yang diusung PDIP. Surat rekomendasi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut

menunjukkan bahwa penentuan calon Wali Kota Surakarta didasarkan pada subjektivitas. Hal ini dikarenakan keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, tanpa melihat panjangnya proses penjangkaran ditingkat DPC.

Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDIP dalam menentukan calon walikota Surakarta menjadi banyak sorotan publik. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka masih banyak menuai masalah karena beberapa persyaratan yang seharusnya diperhatikan dalam menentukan calon kepala daerah di PDIP. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari anggota/kader Partai, di antaranya adalah menjadi kader sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut. Gibran Rakabuming Raka belum tiga tahun menjadi kader PDIP dan baru mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) saat hendak mendaftar di DPD PDIP Jawa Tengah. Di sisi lain, Achmad Purnomo yang memenuhi persyaratan tersebut tidak menggoyahkan keputusan Megawati Soekarnoputri.

Lebih dari itu, syarat lain yang memang menjadi aturan di internal PDIP menyebutkan bahwa calon harus menyertakan rekomendasi dari pengurus partai di mana ia berdomisili. Pengurus Anak Cabang hingga seluruh Pengurus Ranting di bawah DPC PDIP Kota Surakarta telah mengusung satu pasangan calon dalam pilkada, yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo DPP telah menyerahkan nama tim pemenang. Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP dari Kota Surakarta, bahkan mendaftarkan diri melalui DPD PDIP Jawa Tengah. Hal ini pun menjadi isu yang seharusnya dapat mengganjal Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon walikota Surakarta dari PDIP (detiknews.com, 2019).

Oleh karena itu, perekrutan calon di DPC PDIP dilakukan berdasarkan hasil musyawarah untuk mendapatkan calon yang sesuai. Kemudian, faktor proses kaderisasi Achmad Purnomo yang cukup lama menjadikannya sebagai calon terpilih melalui hasil musyawarah. Namun, keputusan yang didasarkan pada subjektivitas ketua umum Megawati Soekarnoputri membuat Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan PDIP pada pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Peraturan partai tidak menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut. Hal ini perlu diperbaiki dalam perekrutan calon kepala daerah di tubuh PDIP. Di saat yang sama, akuntabilitas dalam rekrutmen politik menjadi hal yang mendasar untuk mewujudkan kompetisi yang sehat di dalam partai politik. Kemudian, aturan internal partai harus menjadi pedoman bagi seluruh kader yang terlibat, termasuk ketua umum. Hal ini agar partai memiliki aturan yang jelas dan disiplin dalam menjalankan pedoman tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh kader. ari pengurus tingkat bawah.

Komitmen terhadap Nilai-Nilai atau Ideologi Bersama

Dalam hal ini, platform partai berkaitan dengan visi, misi, dan program partai yang ditanamkan kepada para kader. Dalam konteks kasus ini, platform partai berkaitan dengan upaya DPC PDIP Kota Surakarta dalam menanamkan nilai-nilai nasionalis ketika menghadapi pemilihan Wali Kota 2020. Inilah yang disebut Randall

dan Svåsand (2002: 14) sebagai konsolidasi dimensi internal partai dalam aspek sikap melalui infusi nilai. Hal ini mencakup sejauh mana aktor dan pendukung partai mendapatkan identifikasi dan komitmen terhadap partai yang melebihi insentif keterlibatan diri (Anawati & Al-Hamdi, 2020).

Dalam konteks pemilihan Walikota Surakarta, hasil wawancara dengan YF Sukasno selaku wakil ketua bidang Kaderisasi & Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta menjelaskan bahwa DPC PDIP selalu berkomitmen untuk menegaskan bahwa partai berideologi Pancasila dengan pengejawantahan ideologi politik Soekarno yaitu mekanisme. Hal ini yang membuat basis massa PDIP di Kota Surakarta juga bertahan menjadi signifikan dari waktu ke waktu. Karena memang, masyarakat Kota Surakarta telah mengakui bahwa ajaran Soekarno terdapat dalam nilai-nilai yang diterapkan di PDIP. Dalam konteks ini, hal tersebut memiliki kaitan erat dengan sosok Soekarno yang kharismatik dan kokoh serta trahnya yang kini dipimpin Megawati Soekarnoputri. Hal ini tidak lepas dari kesetiaan masyarakat Kota Surakarta mendukung PDIP hingga daerah ini menjadi basis massa.

Di tengah krisis ideologi di berbagai partai politik di Indonesia. PDIP berkomitmen pada ajaran Soekarno sebagai tonggak perjuangannya dalam setiap kompetisi politik. Lebih dari itu, komitmen terhadap ideologi partai merupakan upaya untuk memperkuat internal DPC PDIP Kota Surakarta dalam pemilihan Wali Kota 2020. Hal ini juga membawa konsekuensi politik bahwa DPC PDIP Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk tidak berkoalisi dalam mengusung Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain karena adanya perbedaan koalisi di tingkat nasional kedua partai, pertimbangan ideologis di daerah juga memperkuat keputusan tersebut sebagai upaya untuk konsisten pada haluan partai yang berbeda.

Lebih dari itu, adanya komitmen ini ditunjukkan dengan keseriusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai bersama dan menempatkannya sebagai pedoman dalam beraktivitas dan menentukan langkah politik. Komitmen ini juga akan memperkuat identitas kolektif dan semangat menjaga keberlangsungan hidup partai (Hinnebusch, 2017). Dalam konteks proses pencalonan Wali Kota Surakarta, DPC PDIP Kota Surakarta berupaya menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada seluruh kader. Hal ini ditanamkan kepada para kader agar muncul rasa militansi dalam sebuah komitmen bersama untuk menghadapi pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Meskipun terjadi permasalahan internal terkait calon yang akan diusung, nilai-nilai kerjasama bagi kader tetap dijaga untuk berjuang membantu siapapun yang dicalonkan oleh PDIP. Hasil wawancara dengan YF Sukasno selaku wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi DPC PDIP Kota Surakarta menjelaskan hal tersebut:

“Kami di DPC menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada seluruh kader, semangat ini sudah memasyarakat di PDIP. Kita bersama-sama berjuang untuk memenangkan pemilihan wali kota ini. Karena gotong royong itu artinya bekerja sama, saling membantu. Jadi kita tidak bekerja sendiri, semua kader punya andilnya masing-masing. Ya, kalau bicara dinamika kepartaian, kalau kader ditanamkan nilai gotong royong, mereka akan tetap semangat berjuang” (Wawancara 23 Desember 2021).

Wawancara menjelaskan bahwa strategi politik DPC PDIP Kota Surakarta dalam menghadapi pemilihan Walikota adalah dengan melakukan kerjasama antar

kader yang sering disebut dengan gotong-royong. Apalagi Kota Surakarta yang merupakan basis massa PDIP kemudian memiliki kader yang masif sehingga membuat kerja sama bisa berjalan dengan baik. Terlepas dari dinamika internal partai terkait pencalonan wali kota, DPC PDIP Kota Surakarta berupaya menanamkan nilai-nilai gotong royong agar tetap terjaga. Hal ini terlihat pada Gibran yang masih memperoleh suara stabil pada Pilwali Kota Surakarta. Istilah gotong royong merupakan semangat para kader untuk selalu memperjuangkan kepentingan partai dan jujur, dalam artian kader mengikuti instruksi DPC PDIP Kota Surakarta dan DPP untuk berkomitmen menjaga nilai-nilai tersebut.

Kemudian, seperti dikutip dari penjelasan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, PDIP merupakan partai politik yang berbeda dari yang lain. Semangat kerjasama politik PDIP juga dianggap sebagai modal dan identitas utama partai untuk memenangkan kontestasi dimanapun berada (Fadil, 2020). Senada, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan partainya menjadikan gotong royong sebagai strategi kemenangan pada Pilkada 2020. Hasto meyakini gotong royong yang tercipta dari semangat para pendiri bangsa mampu membawa perubahan nyata (Irfan, 2020). Hal ini menjelaskan bahwa partai menanamkan kepercayaan kerjasama pada kadernya dalam memenangkan suatu kontestasi politik. Begitu pula pada pemilihan Wali Kota Surakarta tahun 2020, kolaborasi menjadi salah satu strategi kampanye yang disiapkan PDIP untuk mencapai hasil terbaik.

Oleh karena itu, meski ada dinamika pencalonan di DPC PDIP Kota Surakarta yang mengecewakan karena tidak sesuai harapan. Namun dengan upaya DPC PDIP Kota Surakarta yang selalu menjaga semangat kader dengan menanamkan nilai-nilai gotong royong, menjadikan kader teguh dalam komitmennya membantu memenangkan Pilwali 2020. Sehingga sikap kader yang tetap berkomitmen bersama ditanamkan melalui komunikasi DPC PDIP Kota Surakarta; Hal ini menjadikan semangat gotong royong yang kuat sebagai wujud komitmen kader harus terus dijaga, berdampak pada menjaga soliditas untuk memenangkan pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2020.

Penutup

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa soliditas internal PDIP pada Pilkada Surakarta 2020 sangat kuat dari sisi ideologi dan komitmen kader namun terdapat kelemahan pada sisi kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik dan kaderisasi yang sistematis. Jadi soliditas internal PDIP menghadapi Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 dalam kondisi kritis. Alasan Kemenangan paslon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa hanya karena Kota Surakarta merupakan basis massa dari PDIP. Kemudian ditambah juga dengan lawan kontesnya yang sudah dikondisikan sejak awal. Hal ini menjadi catatan bahwa meskipun PDIP merupakan partai besar di Kota Surakarta bahkan Indonesia dengan perolehan suara dan kursi terbanyak, tidak menjamin proses internalnya berjalan baik. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan PDIP adalah proses pengambilan keputusan yang terlalu terpusat, dominannya personal elite di lembaga partai, lemahnya pencegahan konflik internal, tidak jelasnya mekanisme kaderisasi, dan tidak transparannya rekrutmen calon. Dengan demikian, partai politik sebagai lembaga publik mempunyai ujian nyata dalam

mempertahankan eksistensinya secara kelembagaan, yang akan berdampak pada sisi elektoral.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memberikan dukungan fasilitas yang membuat naskah ini dapat di selesaikan dengan baik.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R. (2022). Nationalist-Islamist Party in a Liberal Ecosystem: The Solidity and Campaign Strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) during the 2014 and 2019 Elections. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 290–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.290-304>
- Al-Hamdi, R., Handayani, H. S., Fansuri, H., & Sofyan, N. (2023). The Solidity of Islamist Parties in Contemporary Southeast Asian Elections: A Comparative Analysis between the Malaysian Islamist Party (PAS) and the Prosperous Justice Party (PKS). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.43427>
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). Penelitian Kualitatif: Pegangan mahasiswa ilmu pemerintahan. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 105–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.4636>
- Balmas, M., Rahat, G., Sheaffer, T., & Shenhav, S. R. (2014). Two routes to personalized politics: Centralized and decentralized personalization. *Party Politics*, 20(1), 37–51. <https://doi.org/10.1177/1354068811436037>
- Biezen, I. van, & Poguntke, T. (2014). The decline of membership-based politics. *Party Politics*, 20(2), 205–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354068813519969>
- Bjarnegård, E., & Kenny, M. (2015). Revealing the “secret garden”: The informal dimensions of political recruitment. *Politics & Gender*, 11(4), 748–753. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1743923X15000471>
- Budi, A. (2020). Less democracy, more centralism: the selection of Candidates by Golkar and PDIP in Indonesian subnational executive elections, 2005–2020. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 236–255. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774909>
- Budi, M. (2019). *PDIP: Tak Ada Syarat Minimal 3 Tahun Jadi Kader untuk Maju Pilkada*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4826266/ternyata-maju-pilkada-lewat-pdip-harus-jadi-kader-minimal-3-tahun>
- Budiana, M. (2023). Indonesian Democratic Party Of Struggle (Pdi Perjuangan) Strategy In 2019 West Java Province Legislative Election. *Humanities & Social*

- Sciences Reviews*, 8(3), 95–103.
- Cabada, L., & Tomšič, M. (2016). The rise of person-based politics in the new democracies: The Czech Republic and Slovenia. *Politics in Central Europe*, 12(2), 29–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/pce-2016-0011>
- CNNIndonesia.com. (2020). *Lika-liku Achmad Purnomo Vs Gibran Raih Tiket PDIP di Solo*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623062336-32-516243/lika-liku-achmad-purnomo-vs-gibran-raih-tiket-pdip-di-solo>
- Cross, W. P., & Katz, R. S. (2013). *The challenges of intra-party democracy*. OUP Oxford.
- Crowder-Meyer, M. (2013). Gendered recruitment without trying: how local party recruiters affect women's representation. *Politics & Gender*, 9(4), 390–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1743923X13000391>
- detiknews.com. (2019). *Peserta Pilkada via PDIP Harus 3 Tahun Jadi Kader, Amankah Gibran?* Detiknews.Com.
- Djuyandi, Y., & Suparman, S. M. (2020). Konflik Internal PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 176–190. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13694>
- Fadil, I. (2020). *Gotong Royong Kader PDIP Dinilai Modal Kuat Menangkan Paslon di Pilkada*. Merdeka.Com.
- Flora, M. (2020). *Achmad Purnomo Kecewa jika Rekomendasi PDIP di Pilkada Solo Turun ke Gibran*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/4283213/achmad-purnomo-kecewa-jika-rekomendasi-pdip-di-pilkada-solo-turun-ke-gibran>
- Hinnebusch, R. A. (2017). Political parties in MENA: their functions and development. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 44(2), 159–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13530194.2017.1281577>
- Irfan, M. (2020). *Gotong Royong Jadi Strategi Jitu PDI Perjuangan di Pilkada Serentak 2020, Hasto: Sari Pati Pancasila*. Pikiran-Rakyat.Com.
- Isnanto, B. A. (2019). *Kode Keras PDIP Solo Jika DPP Merekomendasi Gibran: Selesai Partai!* Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4780954/kode-keras-pdip-solo-jika-dpp-merekomendasi-gibran-selesai-partai>
- Isnanto, B. A. (2020). *PDIP Solo Masih Kecewa Purnomo Tergeser Gibran, tapi...* Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5104892/pdip-solo-masih-kecewa-purnomo-tergeser-gibran-tapi>
- Kabasakal, M. (2014). Factors influencing intra-party democracy and membership rights: The case of Turkey. *Party Politics*, 20(5), 700–711. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354068812453366>
- Lindberg, B., Rasmussen, A., & Warntjen, A. (2008). Party politics as usual? The role of political parties in EU legislative decision-making. *Journal of European Public Policy*, 15(8), 1107–1126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13501760802407623>
- Lupu, N. (2014). Brand dilution and the breakdown of political parties in Latin America. *World Politics*, 66(4), 561–602. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0043887114000197>
- Mainwaring, S., & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party

- system theory after the third wave of democratization. *Handbook of Party Politics*, 11(6), 204–227.
- Noor, F. (2015). *Perpecahan dan soliditas partai Islam: Kasus PKB dan PKS di dekade pertama reformasi*. Lipi Press.
- Pedersen, H. H., & Rahat, G. (2021). Political personalization and personalized politics within and beyond the behavioural arena. *Party Politics*, 27(2), 211–219. <https://doi.org/10.1177/1354068819855712>
- Poguntke, T., & Webb, P. D. (2008). „Presidentialization, Personalization, and Populism: The Hollowing Out of Party Government “, Cross WP, Katz RS, Pruyers S. *The Personalization of Democratic Politics and the Challenge for Political Parties*.
- Priyanto, A., Pribadi, U., & Rahmanto, F. (2021). The effect of political party communication through social media on the results of the 2019 legislative general election (nasdem party, pks, and pdip twitter case study). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 12022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012022>
- Priowidodo, G., Swestin, G., & NurVidyarini, T. (2014). The faces of conflict in a political organization: the case of the Indonesia Democracy Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), 608–618. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p608>
- Purnama, A. A. D., Utomo, S., & Martini, R. (2014). Strategi Politik PDIP Dalam Pemenangan Pasangan Ganjar–Heru Di Pilgub Jawa Tengah Tahun 2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), 266–275. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5093>
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>
- Subekti, D., Sutan, A. J., Nurmandi, A., Mutiarin, D., & Al-Hamdi, R. (2023). The protest voting behaviour among local voters in the 2020 Surakarta mayoral election. *Asian Journal of Comparative Politics*, 20578911231161910. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/20578911231161910>

Daftar Narasumber

- YF Sukasno, Wakil Ketua Kaderisasi & Ideologi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surakarta, 14 Desember 2021, pukul 13.30 WIB.
- Ginda Ferachtriawan, Tim Sukses Gibran Rakabuming Raka dan kader Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surakarta, Tanggal 9 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB.
- M. Farid Sunarto, Simpatisan ring 1 Achmad Purnomo, Tanggal 29 Desember 2021, Pukul 15.00 WIB.
- Anggota Bawaslu Kota Surakarta, Divisi Hukum dan Data Informasi Publik Bawaslu Kota Surakarta, Tanggal 23 Desember 2021, Pukul 13. 00 WIB.
- Ardianto Kuswinarno, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Surakarta, Anggota DPRD fraksi Gerindra periode 2019-2024, Tanggal 14 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB.

Tentang Penulis

Dimas Subekti adalah dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi. Fokus risetnya berkaitan dengan politik digital dalam lingkup partai politik, pemilu dan demokrasi.

Ridho Al-Hamdi adalah dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus Kajiannya berkaitan dengan partai politik, pemilu dan demokrasi.